

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA BUNUO  
KECAMATAN BULANGO UTARA**

**Oleh:**

**FEBRIANTI MANTALI**

**NIM: S2116041**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**TAHUN 2019/2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUNUO KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO**

**FEBRIANTI MANTALI**

**NIM : S. 21.16.041**

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Universitas Ichsan Gorontalo  
2020

**PEMBIMBING I**

**Dr. Arman, S.Sos., M.Si**  
**NIDN: 0913078602**

**PEMBIMBING II**

**Hasan Bau, SE., M. Si**  
**NIDN: 0911038704**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**



**Darmawanty Abd. Razak., S.IP., M.AP**  
**NIDN: 0924076701**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI DESA BUNUO KECAMATAN BULANGO UTARA  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh :  
FEBRIANTI MANTALI  
NIM : S2116041

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP

.....

2. Marten Nusi, S.IP., M.AP

.....

3. Sandi Prahara, S.T., M.Si

.....

4. Dr. Arman, S.Sos., M.Si

.....

5. Hasan Bau, SE., M.Si

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
& Ilmu Politik

Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan



Dr. Arman, S.Sos., M.Si  
NIDN : 091308602



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP  
NIDN : 0924076701

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBRIANTI MANTALI  
Nim : S2116041  
Konsentrasi : MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH  
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara” adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat pendapat atau karya yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka akan saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2020

   
FEBRIANTI MANTALI

S2116041

## **ABSTRAK**

**Febrianti Mantali, S2116041.** Dengan program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo 2020 fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, menyusun penelitian dengan judul :” Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara kabupaten Bone Bolango” yang di bimbing oleh Bapak Dr. Arman, S.Sos., M.Si selaku pembimbing 1, dan bapak Hasan Bau, SE.,M.Si selaku pembimbing 2.

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:a.Partisipasi langsungPartisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.b.Partisipasi tidak langsungPartisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain

Hubungan partisipasi masyarakat dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa ialah keikutsertaan masyarakat langsung atau tidak langsung dalam membangun dan mensejahterakan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Seperti keikutsertaan dalam hal memberikan pendapat, ide, atau gagasan , serta memberikan sumbangan seperti pemikiran, uang, material, tenaga, pikiran dan tenaga.

Kegiatan pembangunan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan hanya akan dapat diwujudkan bila terdapat arah dan pentahapan pembangunan yang jelas, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang digunakan dengan sebaik-baiknya dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

**Kata kunci : Partisipasi , Masyarakat, Pembangunan**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah ada kesempitan

(QS. Ath Tholaq:7)

“setelah kesempitan dan kesulitan, akan ada

Kemudahan dan kelapangan”

(ibnul jauziy, Asy Syaukani)

Keberhasilan ada karena ikhtiar dan Doa, dan

Kesuksesan dapat diraih dengan pantang Menyerah

(Penulis)

Kupersembahkan Untuk

- ❖ Kedua orang tuaku
- ❖ Suami dan anakku Arkan
- ❖ Keluarga tercinta
- ❖ Dosen Jurusan Ilmu pemerintahan
- ❖ Almamaterku



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu .

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua selaku umatnya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Shalawat serta salam patut kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad S.a.w, beserta para keluarganya dan para sahabatnya, semoga limpahan rahmatnya dapat sampai kepada kita semua selaku umatnya .

Penulis amat menyadari bahwa dalam proses awal sampai akhir penyelesaian proposal skripsi ini tidak luput dari bantuan banyak pihak yaitu bantuan memberikan semangat, memberikan doa dan dukungan, serta memberikan motivasi. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih utamanya kepada ayahanda (Suwitno Mantali), ibu tercinta (Hidansi Lumoto), suami (Ryanto ahmad), dan anak tercinta (Arkan wiratama ahmad) yang telah mendoakan, memberi dukungan, serta memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Ichsan, SE.,M.,AK selaku Ketua Yayasan Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Bpk Dr.Abdul Gaffar La Tjokke  
M.Si

2. Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bpk Dr.Arman S.Sos.,M.Si  
Universitas Ichsan Gorontalo, serta Wakil Dekan I, II, dan III.

3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik ibu Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP Universitas Ichsan  
Gorontalo

4.Dosen Pembimbing I, Bapak Dr.Arman.S.Sos.,M.Si dan Dosen  
Pembimbing II, Bapak Hasan Bau Universitas Ichsan Gorontalo yang telah  
membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan proposal ini ..

5.Seluruh staf jajaran perpustakaan Universitas Ichsan Gorontalo,  
Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Bone Bolango.

6. Bapak kepala Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone  
Bolango Bapak Jefri Dullah S.E beserta Seluruh staf dan masyarakat Desa  
Bunuo.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah kami memohon rahmat dan hidayah-  
Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin.  
Wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh .

Gorontalo 2019

Penulis

Febrianti mantali (S2116041)



## DAFTAR ISI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUNUO KECAMATAN BULANGO UTARA .....	i
PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	5
1.3    Tujuan Penelitian.....	5
1.4    Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2 .....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1    Konsep Partisipasi .....	7
2.2    Bentuk, jenis, dan syarat partisipasi .....	12
2.2.1    Bentuk Partisipasi.....	13
2.2.2    Jenis-Jenis Partisipasi .....	13
2.2.3    Syarat Partisipasi .....	13
2.3    Konsep Partisipasi Masyarakat.....	15
2.3.1    sifat-sifat partisipasi masyarakat .....	15
2.3.2    Dasar/Alasan Untuk Adanya Partisipasi Masyarakat .....	15
2.3.4    Bidang-bidang untuk partisipasi masyarakat .....	18
2.3.5    mekanisme yang melancarkan partisipasi masyarakat .....	18
2.4    Konsep Desa.....	28
2.5    Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes .....	31
2.6    Kerangka Pikir .....	37

BAB 3 .....	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1    Objek Dan Waktu Penelitian .....	38
3.2    Metode Penelitian.....	38
3.2.1    jenis penelitian.....	38
3.3    fokus penelitian .....	38
3.4    Informan Penelitian .....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV .....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
4.1 Gambaran Umum Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara .....	43
4.1.1 Kondisi Geografis .....	43
4.1.2 visi dan misi desa Bunuo kecamatan Bulango Utara .....	51
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bunuo .....	51
4.1.4 Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa .....	55
4.1.5    karakteristik responden.....	60
4.2    Hasil penelitian dan wawancara .....	62
4.3    Pembahasan.....	82
BAB V .....	85
KESIMPULAN DAN SARAN .....	85
A.Kesimpulan .....	85
B . Saran.....	86
PEDOMAN WAWANCARA.....	92
Daftar pustaka .....	87

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui aspek ekonomi dan politik nasional, bahwa pembangunan yang meliputi aspek ekonomi dan sosial pemerintah mempunyai cara sendiri untuk dapat mengendalikan ekonomi dan pembangunan nasional sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia dapat dilihat melalui peraturan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang *sistem perencanaan pembangunan nasional* (SPPN 2004), yaitu mengenai kedudukan perencanaan pembangunan yang sangat kuat, yang oleh karenanya penyusunan perencanaan harusnya dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua aparat pemerintahan dalam kegiatan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 mengatur perencanaan pembangunan nasional dengan 5 fungsi dan tujuan pokok untuk mendorong proses pembangunan di Indonesia secara terpadu dan efisien, tujuan dan fungsi pokok tersebut yaitu diantaranya: 1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2) menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.

literatur ilmiah yang tersedia memberikan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan dalam berbagai bentuk definisi. Menurut Arthur W. Lewis dalam (Sjafrizal, 2014, hal. 24-25) mendefinisikan “*perencanaan pembangunan* merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”. Sedangkan Jhingan mengeluarkan pendapat dalam (Sjafrizal, 2014, hal. 25) mengenai perencanaan pembangunan ialah merupakan sistem yang disengaja diatur dan dikendalikan oleh penguasa dalam hal ini pemerintah pusat untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu didalam jangka waktu tertentu.

Sistem Perencanaan pembangunan nasional (SPPN) di indonesia mengenal penerapan prinsip desentralisasi yaitu bergerak dari bawah (*bottom up*) mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*) dan dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from add and people*). Dikatakan (*musyawarah perencanaan pembangunan*) yaitu pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik melalui campur tangan dari seluruh pelaku pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pra musrenbang sampai musrenbang desa bunuo kecamatan bulango utara belum di laksanakan secara optimal, karena

keterlibatan dari masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan yang akan dibangun masih sebatas formalitas, ini diakibatkan oleh kurangnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut. Padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna, dan bermanfaat diperlukan masyarakat yang aktif mulai dari tahap perencanaan (pramusrenbang), tahap proses musrenbang , sampai dengan tahap pengawasan.

Proses kegiatan musrenbangdes yang Dilaksanakan Di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango yang tiap tahun dilaksanakan, yaitu diselenggarakan untuk menyusun rencana kerja pembangunan (RKP Desa), penyusunan RKPD ini diikuti oleh penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Maka kedua dokumen ini disusun berdasarkan musyawarah yang dilakukan dalam Musrenbang Desa karena, RKPD dan APBD merupakan dokumen informasi publik yang artinya wajib disampaikan informasinya kepada seluruh warga masyarakat, agar bersifat transparan dan dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan yang ada di desa Bunuo tersebut.

Seperti yang terlihat dalam proses musrenbangdes yang dilaksanakan tiap tahunnya di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. Hal menarik yang penulis temui dilapangan, salah satunya kurangnya peranan atau keikut sertaan masyarakat dalam menghadiri acara musrenbang yang diadakan di setiap kantor desa utamanya di Kantor Desa

Bunuo Kecamatan Bulango Utara. Desa Bunuo memiliki jumlah penduduk yaitu 416 jiwa pada tahun 2019 yaitu 210 laki-laki dan 206 perempuan dengan 130 jumlah KK. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan musrenbang ini terlihat pada daftar hadir musyawarah, dari 130 jumlah KK yang diundang hanya 40kk yang hadir atau mengikuti kegiatan musrenbang tersebut. Ini sangat menjadi kendala bagi pembangunan yang ada di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tersebut, mengingat untuk mencapai *good governance* peran dan keterlibatan langsung dari masyarakat dalam musrenbang sangatlah penting, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat adalah salah satu ujung tombak pembangunan apa yang dibutuhkan dalam lingkungan mereka, dan masyarakat lebih mengetahui apa saja yang bisa menjadi manfaat untuk mereka dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Perencanaan yang dilaksanakan dalam kegiatan Musrenbang Desa tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik jika keterpaduan antara kegiatan pembangunan dan kebijakan atau program pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Slamet dalam (Hasiru & Jasin, 2009, hal. 15) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah masyarakat yang ikut serta dan turun langsung dalam proses pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pemabangunan tersebut. Sedangkan menurut Asngari dalam (Hasiru & Jasin, 2009, hal. 15) mengemukakan pendapatnya mengenai partisipasi yaitu landasan orang-

orang untuk berkomunikasi memecahkan masalah dan menjadi peran serta untuk pembangunan . peran serta yang dimaksud adalah : 1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan 2) terbinanya kebersamaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa bunuo kecamatan bulango utara kabupaten bone bolango.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat masalah yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa bunuo kecamatan bulango utara, kabupaten bone bolango.
2. Apa saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa bunuo kecamatan bulango utara, kabupaten bone bolango.



2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan (musrenbang) di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui tujuan penelitian , maka dapat diambil manfaatnya baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

##### **1. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pada bidang pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan dalam hal partisipasi masyarakat.

##### **2. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa Bunuo agar daerah menjadi lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Partisipasi**

Sejak orde baru partisipasi sudah menjadi jargon pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan. Kita mengenal swadaya murni masyarakat yang senantiasa menjadi syarat untuk mendampingi dana bantuan desa (bandes) yang dikucurkan dari atas dalam hal ini pemerintah pusat melalui inpres bandes, seperti dalam membangun jalan desa, balai desa, dan sebagainya.

Menurut Davis & Newstrom dalam (Husain, 2011, hal. 26) mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan keterpaduan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Sedangkan partisipasi menurut Echols dan Shadily dalam (Husain, 2011, hal. 26) istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yakni participation yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian. Menurut Asngari dalam (Hasiru & Jasin, 2009, hal. 15) menyatakan bahwa, partisipasi itu haruslah ada pengertian bersama antar masyarakat, untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya untuk mencapai tujuan untuk semua pihak. Peran serta semua pihak itu diperlukan: 1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan 2) terbinanya kebersamaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia dalam (Husain, 2011, hal. 66) partisipasi diartikan perihal turut berperan serta dalam semua kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Partisipasi dalam suatu kegiatan yang berskala besar yang tidak mampu dilaksanakan oleh satu atau dua orang saja, bukannya setiap pekerjaan jika dilakukan bersama-sama maka akan terasa lebih ringan.

Ada beberapa macam partisipasi yang dikemukakan oleh ahli. Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010:38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: a. Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain

Ilmuan Keith Davis dalam bukunya yang berjudul “Human Relation At Work” dalam (Sastropoetro, 1986, hal. 13) partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterkaitan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok sebagai pendorong untuk memberikan sumbangan kepada seluruh kelompok dalam usaha mencapai tujuan bersama serta turut serta dalam mempertanggung jawabkan usaha mereka secara bersama-sama.

Menurut Gordon W. Allport dalam bukunya yang berjudul “The Psychology Of Participaction” dalam (Sastropoetro, 1986, hal. 12) bahwa jika seseorang yang berpartisipasi tersebut harus melibatkan dirinya atau

egonya secara langsung bukan hanya pada pekerjaan atau tugas saja, tetapi sekaligus juga melibatkan dirinya pada pikiran dan perasaannya. Atau misalnya anda berpartisipasi /ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan anda pun menyetujui/berkenaan untuk melakukannya . Gordon W.allport (Sastropetro, 1986, hal. 51) juga menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/ pribadi/ personalitas atau kejiwaan lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik saja.

Keith Davis (Sastropetro, 1986, hal. 51) mengemukakan pendapatnya tentang Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang bertujuan untuk memberi dorongan dan sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Sedangkan menurut Achmadi (Sastropetro, 1986, hal. 51) pada simposium gotong royong di jakarta memberikan pendapat tentang partisipasi masyarakat yaitu berupa bentuk swadaya gotong royong sebagaimodal utama. Sedangka swadaya yang dimaksud adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan.

Menurut Santoso S. Hamidjojo (Sastropetro, 1986, hal. 51) berpendapat bahwa partisipasi berarti : 1) turut memikul beban pembangunan. 2) menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya. 3) terwujudnya aktifitas dan oto-aktivitas. Sedangkan menurut Saefullah dalam (Husain, 2011, hal. 105) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang sebenarnya adalah yang didasarkan atas

kesadaran masyarakat dan pengertian terhadap kegiatan bersama yang dilakukannya. Masyarakat menerima dan ikut serta melaksanakan kegiatan pembangunan karena mereka memahami bahwa apa yang dikerjakan bersama itu bermanfaat bagi usaha mereka untuk kini dan sampai yang akan datang.

Konsep partisipasi akan semakin menarik untuk dijelaskan lebih mendetail lagi, jika kita ikut mengaitkan dengan upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pembangunan tersebut. Dalam kerangka ini penulis perlu mengemukakan makna dan peran partisipasi tersebut berarti jika dalam suatu proses pembangunan maka, ikut serta masyarakat secara langsung maupun tidak langsung itu penting untuk meningkatkan taraf hidup mereka dikemudian hari, karena seluruh kebutuhan mereka ada pada partisipasi masyarakat itu sendiri artinya masyarakatlah yang mengerti apa yang mereka butuhkan dan bermanfaat dalam lingkungan mereka tersebut. sebagaimana yang dikemukakan oleh Spencer Dalam (Husain, 2011, hal. 71) Spencer memberikan batasan dari partisipasi dalam empat pengertian yaitu : 1) partisipasi merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan dalam mengintegrasikan semua komponen yang ada dalam organisasi dengan menggunakan pendekatan sistem, 2) Pemimpin menganggap bawahan sebagai komponen yang sangat menentukan pencapaian tujuan, demikian pula sebaliknya, sehingga itu perlu diwujudkan kebersamaan dan keterpaduan didalam organisasi. 3) Partisipasi merupakan proses yang dinamis dalam menyusun dan

mengelompokan pegawai dalam aktifitas-aktifitas dan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan 4) keseluruhan aktifitas partisipasi memerlukan komitmen keterbukaan dari setiap orang yang terlibat didalamnya.

Menurut Gaventa Dan Valderama dalam (Hasiru & Jasin, 2009, hal. 9) ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembanguna masyarakat yng demokratis yaitu : 1) partisipasi politik; 2) partisipasi sosial; dan 3) partisipasi warga. Sedangkan menurut Hetifah Sj Sumarto dalam bukunya inovasi, Partisipasi Dan Good Governance dalam (Hasiru & Jasin, 2009, hal. 41-42) menguraikan beberapa metode dan teknik yang cukup dikenal dan sering digunakan dalam mendorong partisipasi seperti yang terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan proses partisipasi	Metode/teknik yang digunakan
Menciptakan visi bersama	Skenario perencanaan Strategi perencanaan Konfrensi pencarian dimasa depan Pemangku kepentingan dialog
Membangun rencana	Zopp Perencanaan aksi Mawas diri

Mengumpulkan gagasan	Brainstorming  Snow card/snow ball
Menentukan prioritas /membuat pilihan	Nominal group technique (NGT)
Menjaring aspirasi/masukan	Konsultasi publik  Program interaktif di media (radio/tv)
Mengumpulkan informasi/analisis situasi	Analisis swot  Focus group discussion (FGD)  Penilaian partisipatif

Berdasarkan Konsep Partisipasi diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterkaitan antara suatu individu atau kelompok dalam suatu rencana kerja yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan . Jika dikaitkan dengan masalah yang terjadi di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, partisipasi sangat dibutuhkan entah dalam kehadiran, pemberian ide atau masukan, dan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan yang berdaya guna dalam masyarakat itu sendiri.

## **2.2 Bentuk, jenis, dan syarat partisipasi**

Keith Davis Dalam (Sastropetro, 1986, hal. 16-17) mengemukakan bahwa bentuk, jenis, dan syarat partisipasi dapat dilihat sebagai berikut:



### **2.2.1 Bentuk Partisipasi**

1. Masyarakat biasanya berpartisipasi dengan cara berkonsultasi
2. Masyarakat memberikan Sumbangan spontan biasanya dalam bentuk barang
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga)
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari , dan dibiayai seluruhnya oleh komunikasi (biasanya diputuskan oleh rapat desa
5. Sumbangan dalam bentuk tenaga, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
6. Aksi massa atau keterlibatan banyak orang
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa itu sendiri
8. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Partisipasi**

1. Pikiran (psychological participation)
2. Tenaga (physical participation)
3. Pikiran dan tenaga (psychological and physical participation)
4. Keahlian (participation with skill)
5. Barang (material participation)
6. Uang (money participation)

### **2.2.3 Syarat Partisipasi**

Persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah :

1. Waktu : yang dimaksud adalah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pemimpin
2. Dana : Dana merupakan istilah dari perangsang yang artinya kegiatan partisipasi diperlukan dana perangsang atau dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan “memanjakan” yang akan menimbulkan efek negatif.
3. Subyek partisipasi : artinya harus saling berkaitan dengan organisasi, dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya/interesnya.
4. Kemampuan : artinya memiliki luas lingkup pemikiran dan pengalaman yang sama dengan komunikator, dan walaupun belum ada, maka unsur-unsur itu ditumbuhkan oleh komunikator.
5. Komunikasi: memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan bahasa yang sama-sama dipahami sehingga dapat tercipta pertukaran pikiran yang efektif dan berhasil.
6. Peran serta : masyarakat mempunyai hak untuk memilih peran serta apa yang ia sanggupi untuk melaksanakan pekerjaan dalam pembangunan. Misalnya salah satu masyarakat ikut berperan serta dengan cara menyumbangkan tenaga, pikiran, uang, material dan lain sebagainya sesuai dengan keahlian masyarakat tersebut
7. kebebasan : partisipasi hendaknya didasarkan pada kebebasan dalam kelompok. Artinya tidak dipaksakan bila partisipasi diadakan untuk

menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok. Artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan kepada prinsip bahwa partisipasi adalah bersifat persuasif.

## **2.3 Konsep Partisipasi Masyarakat**

### **2.3.1 sifat-sifat partisipasi masyarakat dalam (Sastropetro, 1986, hal. 23)**

1. Partisipasi haruslah bersifat sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
2. Partisipasi haruslah bersifat obyektif artinya Berbagai isu dan masalah harusnya disajikan dan dibicarakan secara jelas.
3. partisipasi haruslah merata dalam setiap kesempatan yaitu mendapat keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dalam program yang akan didiskusikan.
4. Partisipasi masyarakat harus dapat menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri yang menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, misalnya dapat bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

### **2.3.2 Dasar/Alasan Untuk Adanya Partisipasi Masyarakat dalam (Sastropetro, 1986, hal. 20)**

1. Pemerintahan sebagai lembaga yang terbesar dan mempengaruhi kehidupan dan tujuan hidup masyarakat.

2. Pemerintah sebagai dasar masyarakat untuk mencapai tujuan yang dapat memperbaiki tingkat hidup di daerah masing-masing dengan cara melancarkan rencana-rencana pembangunan desa.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup adalah prioritas utama dalam proyek pembangunan desa, program sedemikian mungkin tidak akan dicapai jika tidak ada partisipasi masyarakat
4. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang ikut dalam proses pembangunan di desa, walaupun dengan biaya yang sedikit, jika ada kesadaran masyarakat yang ikut menyumbangkan tenaga dalam pembangunan, tidak ada yang tidak mungkin semua akan berjalan dengan lancar dan terarah . dan pada akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri .

### **2.3.3 Faktor- faktor yang menghambat partisipasi masyarakat**

Dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dihambat oleh beberapa faktor menurut Rahardjo Adisasmita (2006:135) :

- a. Sikap masa bodoh, atau sikap malas.
- b. Makna tipologi ( ciri fisik suatu wilayah )
- c. Pengaruh letak geografis
- d. Jumlah penduduk (demografis)
- e. Keadaan ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat itu terdiri dari beberapa faktor

seperti sikap malas oleh masyarakat itu sendiri, keadaan wilayah di desa tersebut, selain itu jumlah penduduk dan keadaan ekonomi di desa tersebut.

Sedangkan menurut Angell (Firmansyah, 2009) mengatakan partisipasi yang tumbuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor , faktor internal yang menghambat kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi yaitu :

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan dan penghasilan
5. Lamanya tinggal

Menurut Hamijoyo dalam ( Mikkelsen, 2006:6) yang menghambat partisipasi yaitu rendahnya tingkat pendidikan atau sumber daya manusia dan pengetahuan masyarakat menyebabkan kurangnya kemampuan masyarakat berpartisipasi , begitupun dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan pembangunan.

Slamet dalam Ariyanti (sunarti, 2003, hal. 384) menyatakan bahwa faktor-faktor penghambat internal berasal dari kelompok itu sendiri yaitu individu-individu yang didalamnya ada satu kesatuan kelompok. Tingkah laku individu erat hubungannya dengan ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan, sedangkan faktor eksternal-nya adalah Kurangnya peran petaruh (stakeholder) dalam hal ini merupakan kepala lembaga pemerintah daerah sebagai petaruh kunci atau siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan .

### **2.3.4 Bidang-bidang untuk partisipasi masyarakat dalam**

(Sastropoetro, 1986, hal. 21)

1. Dalam proses pengambilan keputusan dan/atau proses perencanaan
2. Dalam proses pelaksanaan program
3. Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program

### **2.3.5 mekanisme yang melancarkan partisipasi masyarakat dalam (Sastropoetro, 1986, hal. 21)**

1. Suara aklamasi didalam proses pengambilan keputusan merupakan faktor ideal yang akan menjamin keberhasilan dari setiap program. Oleh karena hal demikian menunjukkan telah tercapainya keterlibatan yang bersifat menyeluruh dari masyarakat yang bersangkutan.
2. Di tingkat desa konsultasi sederhana mendahului suatu pertemuan dalam bentuk “rembuk desa” yang besar, yang sangat perlu diadakan.
3. Semua rencana pembangunan desa wajiblah berorientasi dan bersifat konsisten dengan filsafat nasional, prinsip-prinsip dan tujuan negara.
4. Pemrakarsa atau “change agent” yang bukan merupakan warga dari daerah operasinya, haruslah dilatih terlebih dahulu dalam hal keterampilan, keakhlian teknik dan pengetahuan teknologi

pengembangan sumber daya manusia guna melancarkan partisipasi masyarakat secara maksimal.

5. Lebih banyak partisipasi masyarakat dapat dicapai, bilamana masyarakat diorganisasikan menurut kepentingan dan tujuan kelompok, sekalipun komposisi dari setiap dewan desa harus memasukkan wakil-wakil dari kelompok yang terorganisasikan sesuai dengan kepentingan dan tujuannya.
6. Sarana visual dan peragaab dari data statistik di tingkat desa, seperti halnya yang telah diterima baik oleh pemerintah indonesia, akan memperlancar dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi sejak mereka menaruh minat dan mendapat informasi yang luas tentang situasinya yang bersifat khusus dan juga tentang kebijaksanaan serta rencana-rencana pemerintahannya.
7. Suatu dialog dan/atau forum untuk komunikasi dua arah merupakan suatu sarana yang idealistik untuk menjamin terdapatnya partisipasi aktif dan melancarkan proses pengambilan keputusan.

#### **2.4 Konsep Perencanaan Dan Pembangunan**

Perencanaan yaitu suatu metode atau cara untuk membangun daerah agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam konteks secara menyeluruh dapat berdaya guna. Dapat disimpulkan, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan



kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Menurut Denovan Dan Jackson dalam (Husain, 2011, hal. 25) Perencanaan dapat menjadi 6 proses umum yaitu : 1) menciptakan kebijakan, tujuan, dan standar untuk memastikan kegiatan berjalan lancar atau tidak. 2) mengembangkan aturan dan prosedur dengan tujuan untuk memudahkan perencanaan 3) mengembangkan rencana agar memperoleh hasil yang efektif 4) melakukan ramalan agar dapat menyiapkan dan menentukan hasil yang akan datang. 5) menganalisis lingkungan yaitu dengan menempatkan perencanaan pada posisi strategis. 6) mengevaluasi efektivitas proses perencanaan .

Dalam menyusun perencanaan sedapat mungkin melewati proses kegiatan tersebut, tanpa mengabaikan proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan agar dapat menghasilkan hasil yang bisa dimanfaatkan, sehingga apa yang dikerjakan pada kemudian hari akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan, dalam arti berhasil secara efisien dan efektif. Siagian (Husain, 2011, hal. 28) mengemukakan bahwa proses perencanaan itu dapat ditinjau dari tiga segi sebagai berikut : 1) mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat atau ciri-ciri apakah bisa berjalan dengan baik. 2) melihat atau memperhatikan proses perencanaan sebagai suatu rangkaian perencanaan yang harus dijawab dengan memuaskan, dan 3) memandang

proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah atau langkah-langkah yang berlangsung secara sistematis.

Sebagai suatu pendapat umum dalam (Makmur, 2009, hal. 256) Pembangunan merupakan salah satu konsep atau gagasan yang dapat memberikan suatu perubahan dalam kehidupan manusia yang lebih unggul dalam melakukan persaingan, salah satu perdebatan yang cukup tajam diantara para pakar terutama menetapkan suatu strategi yang mana seharusnya didahulukan antara pemberdayaan (empowerment) dan pembanguna (development).

Ada tiga pendapat tentang arti pembangunan yakni : 1) pembangunan adalah proses jangka panjang atau diperhatikan sampai nanti. 2) pembangunan adalah menghilangkan ketidaksempurnaan pasar atau memanfaatkan pasar agar lebih berguna. 3) pembangunan adalah industrialisasi menurut Kadiman dalam (Husain, 2011, hal. 84)

Menurut Arthur W.Lewis dalam (Sjafrizal, 2014, hal. 24-25) mendefinisikan perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan dari pemerintah untuk merangsang masyarakat dan swasta agar menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif, lebih terarah, lebih dimanfaatkan . Sedangkan menurut Jhingan Dalam (Sjafrizal, 2014, hal. 25) perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah)

pusat sekaligus termasuk dalam visi dan misi daerah dalam membentuk daerah menjadi daerah yang berdaya guna untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu.

Dalam buku Sjafrizal menjelaskan komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah: 1) usaha pemerintah akan terencana tidaknya proses pembangunan untuk mengatur dan mengendalikan proses pembangunan, 2) cakupan periode jangka panjang, menengah dan tuhanan, 3) variabel-variabel apa saja yang menyangkut dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung, 4) sasaran yang jelas harus ada guna untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Sudriamunawar, 2012, hal. 74) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Sudriamunawar, 2012, hal. 74-75) ada lima hal pokok yang harus diketahui sehubungan dengan perencanaan pembangunan yaitu: 1) masalah apa saja yang dkaitkan dengan sumber-sumber pembangunan, 2) tujuan serta sasaran rencana apa yang ingin dicapai, 3) kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana, 4) program-program atau kegiatan-kegiatan yang lebih konkrit. Sedangkan menurut Widjojo Nitisastro dalam (Sudriamunawar, 2012, hal.

75) merinci apa saja yang mencakup dalam perencanaan pembangunan yaitu diantaranya : 1) penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan yang konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu , Atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. 2) pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang , jangka menengah dan jangka tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Ada 5 beberapa tujuan dan sasaran pokok perencanaan pembangunan di Indonesia dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan .

Tujuan diwujudkan keterpaduan antara pelaku pembangunan tersebut adalah sebagai alat koordinasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh instansi untuk bisa mencapai sasaran pembangunan. Kaitannya dengan hal ini yaitu, koordinasi antara dinas dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menjadi sangat penting sekali dengan mempedomani apa yang telah ditetapkan dalam rencana

pembangunan daerah yang bersangkutan. Wadah yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan koordinasi ini adalah forum SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan MURENBANG (musyawarah perencanaan pembangunan) yang dilakukan secara berkala.

2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Perencanaan pembangunan sudah termasuk pula dengan adanya perencanaan nasional dan daerah dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah tersebut sehingga proses pembangunan nasional secara keseluruhan bisa semakin terpadu, cepat, dan efisien, sehingga pula bisa terwujud pembangunan dalam jangka yang panjang.

3. mengaitkan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin agar apa yang direncanakan dapat dilaksanakan (diimplementasikan) dengan baik. Terkaitannya dengan penganggaran perlu terus diupayakan, karena pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya anggaran untuk masing-masing program kegiatan secara mencakup.

4. pengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dalam menentukan pelaksanaan perencanaan partisipatif ada aspek-aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan yaitu dalam hal ini melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan diskusi, dan berupa pertemuan seminar guna untuk mendapat perhatian dari masyarakat tentang visi dan misi dalam pembangunan.

5. menjamin sumber daya secara efisien agar bisa dicapai, dan dapat secara efisien, efektif, dan adil.

Aspek penting yang harus diupayakan oleh pemerintah yaitu berupaya menyusun dengan baik dan layak secara teknis untuk menjamin pelaksanaannya dilapangan nanti dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.

Jenis-jenis perencanaan pembangunan menurut lincolin arsyad (Sjafrizal, 2014, hal. 30) terbagi atas 3 jenis yaitu :

#### 1. Perencanaan jangka panjang

Biasanya mencakup waktu yang 10-20 tahun yang biasa disebut dengan perencanaan perspektif yang isinya adalah arah pembangunan secara umum.

#### 2. Perencanaan jangka menengah

Biasanya mencakup waktu 4-5 tahun tergantung masa jabatan presiden atau kepala daerah . perencanaan jangka panjang biasanya lebih bersifat operasional. Yang memuat sasaran dan terget pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif supaya perencanaan tersebut bisa menjadi lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasara dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

#### 3. Perencanaan jangka pendek

Biasanya mencakup waktu hanya dalam jangka waktu 1 tahun, rencana ini merupakan jabaran dari rencana jangka menengah, yang bersifat operasional karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya.

Berdasarkan sifatnya perencanaan pembangunan menurut lincolyn arsyad (Sjafrizal, 2014, hal. 32) terbagi atas 2 yaitu perencanaan dengan komando (*central planning*) dan perencanaan dengan rangsangan (*Planning By Incentives*). Perencanaan dengan komando artinya perencanaan dengan jenis pelaksanaannya secara terpusat dan pelaksanaannya dikomandokan secara tegas dan keras oleh pemerintah. Sedangkan perencanaan dengan rangsangan yaitu dilakukan secara demokratis dan lebih banyak didasarkan pada “mekanisme pasar”.

Berdasarkan alokasi sumber daya, perencanaan pembangunan menurut lincolyn arsyad (Sjafrizal, 2014, hal. 33) terbagi atas dua yaitu perencanaan keuangan dan perencanaan fisik . perencanaan keuangan digunakan untuk menyusun kebutuhan dana program dan kegiatan dan dalam rangka menghapus ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dengan penyusunan rencana keuangan yang tepat. Sedangkan perencanaan fisik adalah untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan melalui alokasi faktor produksi dan hasil produksi sehingga dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan tingkat keluwesan, perencanaan pembangunan menurut lincolyn arsyad (Sjafrizal, 2014, hal. 34) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perencanaan indikatif dan perencanaan imperaktif. Perencanaan indikatif adalah gabungan dari mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah di negara-negara berkembang, tujuannya yaitu sektor swasta bisa berkembang dengan baik. Sedangkan, perencanaan imperaktif sama dengan perencanaan dengan komando dimana semua kegiatan diluar negara untuk kepentingan masyarakat banyak.

Berdasarkan sistem ekonomi, perencanaan pembangunan menurut (Sjafrizal, 2014, hal. 35-36) dikelompokkan menjadi tiga yaitu: perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalisme, perencanaan pembangunan dalam sistem komunis, dan perencanaan pembangunan dalam sistem campuran. Perencanaan pembangunan dalam sistem kapitalisme adalah didasarkan pada mekanisme pasar yang berperan sebagai “invisible hand”. perencanaan pembangunan dalam sistem komunis atau sosialis merupakan perencanaan yang terpusat secara komando untuk semua kegiatan sosial dan ekonomi. Sedangkan perencanaan pembangunan dalam sistem campuran yaitu gabungan antara perencanaan pembangunan secara kapitalisme dan komunis, dimana pertimbangan utamanya adalah masing-masing sistem perencanaan pembangunan diatas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Berdasarkan cara pelaksanaannya perencanaan pembangunan menurut (Sjafrizal, 2014, hal. 36-37) terbagi atas dua yaitu perencanaan



sentralistik dan perencanaan desentralistik dengan pengertian masing – masing , perencanaan sentralistik yaitu semua keputusan dan kebijakan pembangunan yang penting semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui badan perencanaan pembangunan nasional, sedangkan perencanaan desentralistik adalah kebalikannya yaitu kewenangan pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup penting disamping kewenangan pemerintah pusat.

Dalam buku (Sjafrizal, 2014, hal. 38-39) ada 4 tahapan perencanaan pembangunan yaitu : tahap penyusunan rencana, tahap penetapan rencana, tahap pengendalian pelaksanaan rencana, dan tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana.

Gant Dalam (Husain, 2011, hal. 8) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan daerah yaitu sebagai desentralisasi dalam pembangunan dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal, dari pemerintah desa terutama dalam perencanaan dan pelaksanaannya berdasarkan kondisi alam (the natural), dan lokasi (location), dimana pembangunan dilaksanakann.

## **2.5 Konsep Desa**

Menurut Sayoga dalam (Husain, 2011, hal. 76) kata desa berasal dari bahasa india, yakni swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Dalam konteks pemerintahan di indonesia menurut Wasistiono Dan Tahir (Husain, 2011, hal. 76) istilah desa ini yang dipakai secara formal oleh masyarakat baik dalam administrasi pemerintahan maupun dalam aktivitas sehari-hari. Walaupun ada istilah lain yang disamakan dengan nama desa yang berlaku di indonesia, seperti dukun dan marga bagi masyarakat sumatera selatan, dati di maluku, nagari di minang, atau wanua di minahasa. Di daerah gorontalo juga memiliki istilahnya tersendiri, orang menyebut desa dengan istilah kambungu , istilah tersebut digunakan oleh sesama warga masyarakat dalam komunikasi sehari hari.

Menurut Kartohadikusumo dalam (Husain, 2011, hal. 76) desa adalah suatu daerah yang memiliki satu kesatuan hukum, dimana yang bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 ayat 1 tentang PERDA dalam (Yustisia, 2015, hal. 42) yang dimaksud dengan Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bata wilayah tertentu yang berwenang atau berkewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut hampir sama dengan batasan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam

(Widjaja, 2010) yakni desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan republik indonesia.

Sedangkan, dalam struktur pemerintahan dalam (Husain, 2011, hal. 77) desa adalah wilayah pemerintahan berada dibawah kecamatan, atau kepala desanya yang terendah di bawah camat, tetapi ada pengecualian pula bahwa desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Bahwa dengan hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri itu, maka pemerintah desa terdiri atas kepala desa bersama perangkatnya dan lembaga masyarakat desa (LMD).

sedangkan menurut Kontjaraningrat dalam (Husain, 2011, hal. 77) ada enam ciri kehidupan masyarakat desa yakni : 1) konflik dan persaingan , 2) kegiatan bekerja keras, 3) sistem tolong menolong, 4) jiwa gotong royong, dan 5) jiwa musyawarah.

Ali Dalam (Husain, 2011, hal. 79) mengatakan bahwa secara praktis, kekhasan kehidupan desa seringkali nampak pada gejala kontrol sosial dan solidaritas sosial. Kontrol sosial dalam kehidupan desa nampak pada bagaimana pekanya warga masyarakat desa terhadap terjadinya penyimpangan akan adat istiadat serta norma-norma kehidupan yang ada, apalagi yang terkait dengan norma agama dapat dilihat pula dengan adanya

solidaritas sosial oleh masyarakatnya dalam memperthankan dan membela norma-norma sosial mereka.

## **2.6 Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes**

Menurut Widjaja dalam (Widjaja, 2010, hal. 3) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Yang menjadi Landasan pemikiran dalam mengenal pemerintahan desa adalah keanekaragaman,

Menurut Tjendreng dalam (Husain, 2011, hal. 88) bahwa pembangunan desa pada hakikatnya adalah usaha dalam sesuatu aspek kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat desa yang secara sadar dan memiliki kecerdasan dalam aspek kehidupan desa baik mengembangkan kesejahteraan maupun kualitas kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditujukan untuk mengubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa .

Menurut Ali dalam (Husain, 2011, hal. 90) mengemukakan bahwa program-program pembangunan desa terdiri atas beberapa aspek yaitu diantaranya : 1) infrastruktur. 2) peningkatan kesehatan. 3) nutrisi. 4) air dan sanitasi. 5) kredit pemodalan. 6) pengembangan kepemimpinan. 7) pemberantasan buta huruf, dan 8) penciptaan lapangan kerja. Program-program tersebut dikatakan sebagai konsep dalam pembangunan karena bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir tetapi juga batin dari warga masyarakat desa. Bahkan Wasistiono dan tahir dalam (Husain, 2011, hal. 90) dalam rangka pengembangan otonomi desa yang memiliki kaitan dengan pembangunan nasional dan daerah membagi dalam 5 aspek, yakni 1)

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 2) peningkatan kapasitas sosial politik, 3) peningkatan kapasitas sosial ekonomi, 4) peningkatan kapasitas sosial budaya, 5) peningkatan kapasitas sosial agama.

Menurut Jayadinata dan Pramandika dalam (Husain, 2011, hal. 90) pembangunan desa dibagi menjadi dua kegiatan yaitu : 1) proyek produktif yang langsung dilaksanakan di bidang pertanian, dan 2) proyek produktif dan sosial yang tidak langsung pelayanan sosial dan ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, pasar, dan pengolahan hasil. Sedangkan,

Tjokroamidjojo dalam (Husain, 2011, hal. 67) ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu: 1) rakyat ikut berpartisipasi atau terlibat dan ikut serta dalam menentukan arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara. 2) rakyat ikut merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan peningkatan artikulasi atau kemampuan mereka. 3) masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik. 4) pentingnya melakukan perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Cohen Dan Uphoff dalam (Husain, 2011, hal. 68) mengemukakan empat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang meliputi : 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan . 2) partisipasi dalam pelaksanaan

pembangunan. 3) partisipasi dalam menikmati pembangunan. 3) partisipasi dalam mengevaluasi pembangunan dan 4) pemanfaatannya.

Menurut Whiratnolo dan Nugroho dalam (Husain, 2011, hal. 125) mengemukakan bahwa proses perencanaan pembangunan dimulai dari : 1) pengumpulan informasi untuk perencanaan yang akan dianalisis. 2) perumusan kebijaksanaan, hingga 3) kegiatan peramalan (forecasting).

Menurut Walidun Husain dalam bukunya yang berjudul “participative leadership” halaman (126) menyatakan Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholders yang dilakukan desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). Adapun mekanisme pelaksanaan Musrenbang desa terdiri dari 3 tahap yakni : 1) tahap persiapan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap pengawasan.

Menurut Ericson dalam Slamet (1994: 89) partisipasi dapat dilihat dalam 3 (tiga) tahap yakni dalam partisipasi didalam tahap perencanaan, partisipasi didalam tahap pelaksanaan dan partisipasi didalam tahap pengawasan. Menurut penjelasannya dapat diketahui di bawah ini yaitu :

#### 1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*)

Partisipasi di dalam tahap perencanaan dalam kajian ini penulis mendefenisikannya sebagai sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah konsep perencanaan yang nantinya akan menjadi pembahasan di tahap pelaksanaan nanti , program dan ide-ide yang kemudian dirumuskan dalam sebuah forum rembug warga atau lebih dikenal

dengan *pramusrenbang* guna pengumpulan data awal yang disebut dengan *data pramusrenbang* dan selanjutnya akan dibawa kedalam forum musrenbang Desa (tahap pelaksanaan).

## 2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

Tahap pelaksanaan dalam kajian ini merupakan tindak lanjut dari tahap perencanaan (*pramusrenbang*) yakni proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang selanjutnya disebut *Musrenbang Desa*. Partisipasi dalam tahap ini meliputi pemberian respon terhadap data *pramusrenbang*, data musrenbang tahun-tahun sebelumnya dan program-program yang akan dilaksanakan atau yang akan dibangun sesuai dengan keputusan bersama pada saat melakukan tahap perencanaan sebelumnya atau keputusan yang menjadi prioritas apa yang nantinya akan diputuskan dan dibangun nantinya.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan musrenbang Desa yang diwujudkan dalam bentuk pemberian ide-ide sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara. Selain itu dapat dilihat dari keterlibatan dalam kehadiran, memberikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan musrenbang tersebut.

## 3. Partisipasi di dalam tahap pengawasan (*supervition stage*)

Partisipasi dalam tahap pengawasan berkaitan dengan pengawalan oleh masyarakat Desa Bunuo terhadap usulan program yang telah diputuskan, dirumuskan dan dihasilkan pada musrenbang Desa agar usulan tersebut

dapat diterima dan dimasukkan dalam usulan Desa dan di ditetapkan untuk direalisasikan. Setelah itu jika selesai di realisasikan maka masyarakat hanya tinggal mengawasi pemanfaatan pembangunan tersebut apakah digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Pemanfaatannya secara menyeluruh atau tidak.

Menurut totok murdikanto dan Poerwoko Soebiato Kata musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan berkaitan erat dengan Kata musyawarah yang berasal dari bahasa arab yang menggambarkan bagaimana warga dalam kelompok masyarakat saling berdiskusi memecahkan masalah, konflik dan juga problem yang ada di masyarakat tersebut. Prinsip musyawarah dalam buku ensiklopedia islam, kata musyawarah menurut istiqah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau ummat mengenai suatu urusan.

Menurut rianingsih Djohani (hal 5:2008 ) Dalam pelaksanaan Musrenbang tentunya memiliki tujuan. Tujuan musrenbang diantaranya yaitu :

1. Menyusun prioritas kebutuhan/masalah yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKP Desa.
2. Mempersiapkan prioritas masalah daerah yang ada di Desa tersebut yang nantinya akan diusulkan melalui Musrenbang Desa untuk menjadi kegiatan pemerintah Daerah.



3. Memaparkan persoalan Daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang Desa untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.

Proses Musrenbang terdiri dari tiga tahap yaitu : Tahap Pra-musrenbang, tahap musrenbang, dan pasca musrenbang.

#### A. Tahapan pra-musrenbang

Kegiatan Pra-musrenbang merupakan proses dimana selain membagikan undangan yaitu menyiapkan materi yang akan dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang untuk rencana pembangunan desa secara baik.

#### B. Tahapan pelaksanaan musrenbang

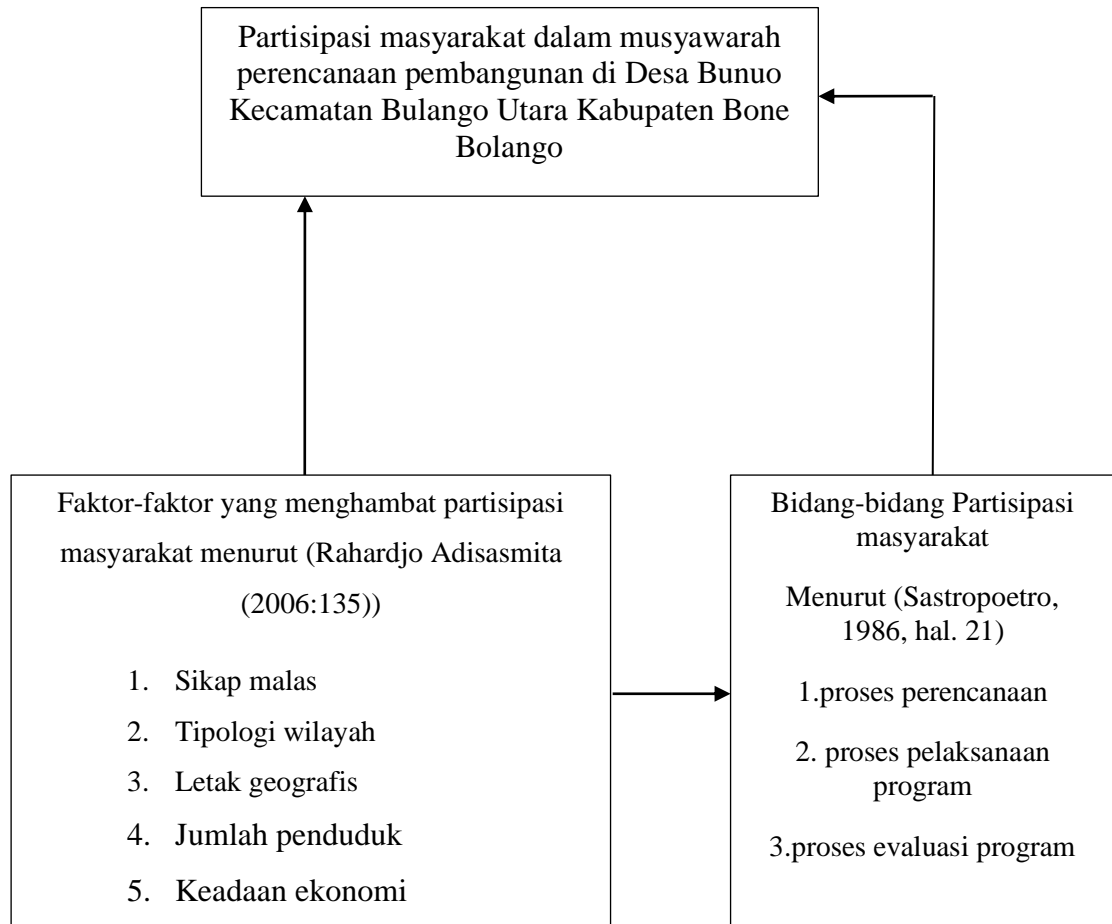
Kegiatan musrenbang diikuti oleh keterwakilah wilayah, keterwakilan masyarakat , keterwakilan unsur tata pemerintahan. Kemudian menyiapkan daftar-daftar apa saja yang menjadi prioritas kegiatan untuk menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) untuk tahun anggaran yang direncanakan. Dan daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di musrenbang kecamatan.

#### C. Tahapan pasca-musrenbang

Pada tahap pasca-musrenbang yang dibahas mengenai:

1. Penyusunan daftar prioritas masalah desa, penyusunan RKP desa sampai menjadi SK Kades.
2. Pembekalan tim delegasi desa oleh TPM (termasuk tim pemandu)
3. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD)

## 2.7 Kerangka Pikir



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Dan Waktu Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan Di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango . Adapun penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan terhitung dari bulan februari sampai bulan maret tahun 2019.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif – deskriptif dengan maksud memberikan gambaran dengan jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan dan menjelaskan data, fakta secara informasi secara sistematis.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian akan berperan penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Yang menjadi fokus penelitian diambil dari

1. teori (Sastropetro, 1986, hal. 21) mengenai bidang-bidang partisipasi masyarakat diantaranya :

- a. Dalam proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan

- b. Dalam proses pelaksanaan program
  - c. Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program
2. Faktor- faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, Dalam suatu masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dihambat oleh beberapa faktor menurut Rahardjo Adisasmita (2006:135) :
- a. Sikap masa bodoh, atau sikap malas.
  - b. Makna tipologi ( ciri fisik suatu wilayah )
  - c. Pengaruh letak geografis
  - d. Jumlah penduduk (demografis)
  - e. Keadaan ekonomi (desa miskin/tertinggal)

### **3.4 Informan Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa informan yaitu diantaranya :

- 1. Kepala Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango 1 orang.
- 2. Kepala seksi pemerintahan Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango 1 orang.
- 3. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan Desa Bu Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango 1 orang.
- 4. Tokoh masyarakat 8 orang

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

1. data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian objek, penelitian pengamatan, dan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa.
2. data sekunder adalah data yang diperoleh perpustakaan, pengumpulan data dan wawancara serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2. wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang telah dipilih guna memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya mengenai partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
3. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh mengenai buku, dokumen, dan referensi sebagai penunjang yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes.

4. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi selanjutnya akan di analisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti yang berkaitan dengan Partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango .

Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif . sebagaimana yang dikemukakan oleh Kirk dan Miller dalam (Sudarto, 2002, hal. 62) penelitian Kualitatif adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam (Sudarto, 2002, hal. 62) penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Sebagaimana bentuk pendekatan ini dipilih untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan Musrenbang di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, bagaimana bentuk partisipasi, dan peran masyarakat dalam kegiatan Musrenbang tersebut.

Untuk mengetahuinya peneliti terjun langsung di lapangan dengan melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat dan aparat desa .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu wilayah yang terdapat di sebelah timur Kabupaten Gorontalo. Wilayah yang meliputi 18 kecamatan, 5 kelurahan, dan 160 desa ini 18 kecamatan diantaranya yaitu : Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone raya, Kecamatan bulango selatan, Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bone pantai, Kecamatan Bulango timur, Kecamatan Bulango ulu, Kecamatan Bulango utara, Kecamatan bone, Kecamatan Kabila, Kecamatan Bulango bone, Kecamatan botu pingge, Kecamatan Suwawa, Kecamatan tapa, Kecamatan Suwawa tengah, Kecamatan Suwawa timur, Kecamatan Suwawa selatan, dan Kecamatan Tilongkabila. Sedangkan Bulango Utara memiliki 8 desa yaitu : Desa Bunuo, Desa Bandungan, Desa Boidu, Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Longalo, Desa Suka damai, Desa Tuloa, dan Desa Tupa.

Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara memiliki luas 26,37 Ha dengan batas-batas wilayah yaitu diantaranya :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa longalo
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Atinggola



- c. Sebelah timur berbatasan dengan tuloa
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tupa

#### **A. Keadaan Demografi**

Dalam struktur penduduk yang ada di Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara tercatat dengan Jumlah Penduduk adalah 416 jiwa yang diantaranya terdiri dari laki-laki 98 jiwa, dan perempuan terdiri atas 32 jiwa dengan jumlah Kepala keluarga 130 KK, dengan penganut Agama Islam 100 %.

*Tabel 1: Keadaan dan Jumlah Penduduk*

<b>Jumlah</b>	<b>Laki-laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
Jumlah penduduk tahun ini (2020)	210	206
Jumlah penduduk tahun lalu (2019)	210	204
Persentase perkembangan	0.00%	%

*Sumber : Dokumentasi Desa Bunuo tahun 2020*

#### **B. Komposisi Jumlah Kepala Keluarga (KK)**

jumlah kepala keluarga laki-laki lebih banyak yakni sebesar 98 orang dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga perempuan yaitu 32 orang dari tahun ke tahun .

*Tabel 2: komposisi Jumlah Kepala Keluarga (KK)*

<b>Jumlah</b>	<b>KK Laki-laki</b>	<b>KK Perempuan</b>	<b>Jumlah Total</b>
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini(2020)	98	32	130
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu(2019)	95	32	127
Persentase Perkembangan	%	0.00%	%

*Sumber : Dokumentasi Desa Bunuo Tahun 2020*

### **C. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bunuo**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung dan membentuk karakter manusia itu sendiri agar menjadi seseorang yang berkualitas dan berguna untuk banyak orang. Dalam hal ini manusia yang mempunyai pribadi yang berkualitas dapat membuat keputusan secara dinamis dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah . adapun keadaan pendidikan penduduk di Desa Bunuo kecamatan Bulango Utara menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

*Tabel 3: keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Bunuo*

<b>Tingkat Pendidikan Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
------------------------------------	---------------

	<b>(Orang)</b>
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	30 Orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	29 Orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	1 Orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	30 Orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	113 Orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	30 Orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	16 Orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	25 Orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	10 Orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	6 Orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	49 Orang
Jumlah penduduk tamat D-1	2 Orang
Jumlah penduduk tamat D-3	3 Orang
Jumlah penduduk sedang S-1	2 Orang
Jumlah penduduk tamat S-1	10 Orang
Jumlah penduduk sedang S-2	1 Orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	1 Orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	6 Orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	6 Orang

Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	5 Orang
% Penduduk buta huruf [(1): jumlah penduduk] x 100%	30 Orang
% Penduduk tamat SLTP/ sederajat [(3): jumlah penduduk] x 100%	25 Orang
<b>Wajib belajar 9 tahun</b>	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	61 Orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	60 Orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	2 Orang
Jumlah kelompok belajar Paket A (Kelompok)	1 Kelompok

*Sumber : Dokumentasi Desa Bunuo Tahun 2020*

Dari Tabel 3 diatas dapat di ambil keputusan bahwa jumlah penduduk yang tamat belajar sekolah dasar ada 113 orang, yang tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama ada 25 orang dan yang tamat sekolah lanjutan tingkat atas ada 49 orang. Sedangkan yang tamat D1 ada 2 orang, tamat D3 ada 3 orang, dan tamat S1 ada 10 orang. Hal ini dapat ditarik kesimpulan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi , terlihat disini yang lulus sampai dengan selesai S1 hanya 10 orang dari jumlah penduduk yang ada, ini artinya masyarakat yang berkualitas masih sangat sedikit .

#### **D. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Desa Bunuo**

Berdasarkan Data yang ada di Kantor Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara Penduduknya berjumlah 416 jiwa , sebagian besar warga bekerja dibidang peternakan, sedangkan urutan kedua yaitu penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani . Dibawah ini adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Bunuo

*Tabel 4 : Data jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian*

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pertanian	71 orang
2	Perkebunan	71 orang
3	Peternakan	120 orang
4	Buruh	23 orang
5	Karyawan swasta	20 orang
6	PNS	4 orang
7	Lain-lain	107 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>416 orang</b>

*Sumber : Dokumentasi Desa Bunuo tahun 2020*

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Bunuo yaitu bersumber dari peternakan, sumber pendapatan masyarakat berasal dari beternak kambing, ayam maupun ternak lainnya. Serta sedikit dari pertanian dan perkebunan yaitu sebagai petani sawah, jagung, dan singkong. Dari kegiatan beternak itulah tingkat penghasilan masyarakat Desa Bunuo mengalami

perubahan yang signifikan, masyarakat Desa Bunuo dapat memenuhi kebutuhan pokok dari penghasilan mereka beternak dan lain-lain.

#### **E. Tokoh pemimpin Desa Bunuo kecamatan Bulango Utara**

*Tabel 5: Nama-nama kepala desa dari periode pertama sampai periode sekarang*

<b>NO</b>	<b>NAMA KEPALA DESA</b>	<b>PERIODE</b>	<b>LAMA MENJABAT</b>	<b>KET</b>
1	Dahlan suleman	2007-2017	10 Tahun	
2	Proklawindo Madjid	2017-2018	1 Tahun	
3	Jefry Dullah, S.E	2018- sekarang	2 Tahun	

*Sumber : Dokumentasi Desa Tahun 2020*

Pada Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa yang paling lama menjabat yaitu bapak dahlan Suleman, penyerahan Jabatan ditentukan oleh Kepala Camat. Sejak terbentuknya Kantor Desa Bunuo sampai dengan Sekarang jabatan Sebagai Kepala Desa Dipercayakan kepada Bapak Dahlan Suleman.

#### **F . Sejarah Pembangunan Desa**

Pembangunan yaitu bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarkat. Sedangkan tujuan pembangunan desa dinyatakan didalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Pembangunan kebutuhan masyarakat itu sendiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 6: Sejarah pembangunan desa dari tahun ke tahun*

<b>NO</b>	<b>PEMBANGUNAN/KEGIATAN</b>	<b>TAHUN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pembangunan Kantor Desa	2011	BANDES
2	Pembangunan Sekola TK/PAUD	2018	APBD
3	Pembangunan BUMDES	2015	APBD
4	Pembangunan Puskesmas/Posyandu	2019	PNPM
5	Pembangunan Rumah Mahyani 21 unit	2017	APBD
6	Pembangunan Rumah Kumuh dari Provinsi 8 unit	2018	APBD
7	Pembangunan Rumah Kumuh dari kabupaten 21 unit	2018	APBD
8	Pembanguna MCK umum 10 unit	2019	APBD
9	Pembangunan Lapangan Takraw	2019	APBD
10	Pembangunan Lapangan Volly	2019	APBD
11	Pembangunan Jembatan Gantung	2018	SWADAYA

*Sumber : Dokumentasi Desa tahun 2020*

#### **4.1.2 visi dan misi desa Bunuo kecamatan Bulango Utara**

Visi Desa Bunuo kecamatan Bulango Utara yaitu : Menjadikan Desa Bunuo yang Cerdas, Maju, Mandiri dan Sejahtera. Sedangkan,

Misi Desa Bunuo kecamatan Bulango Utara yaitu :

1. mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
2. meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima
3. meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat
4. meningkatkan taraf hidup masyarakat
5. mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi berbasis pada potensi desa
6. meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif
7. meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum
8. meningkatkan kerja sama dan gotong royong dalam bermasyarakat yang berazaskan kekeluargaan.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bunuo**

Dalam struktur organisasi pemerintahan di Desa Bunuo yaitu dibawah kepemimpinan kepala desa bapak Jefry Dullah SE dimana



pengertian Desa merupakan suatu Wilayah administratis yang berada dibawah tingkat kecamatan, dimana ini merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang disebut dengan dusun, kampung, bajar, maupun jorong. Menurut peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan pada asal usul istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan Indonesia (NKRI) .

Pemerintah Umum yang berlaku di Desa Bunuo meliputi : organisasi pemerintahan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa Bunuo, gambaran pelayanan, struktur organisasi pemerintahan Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone bolango.

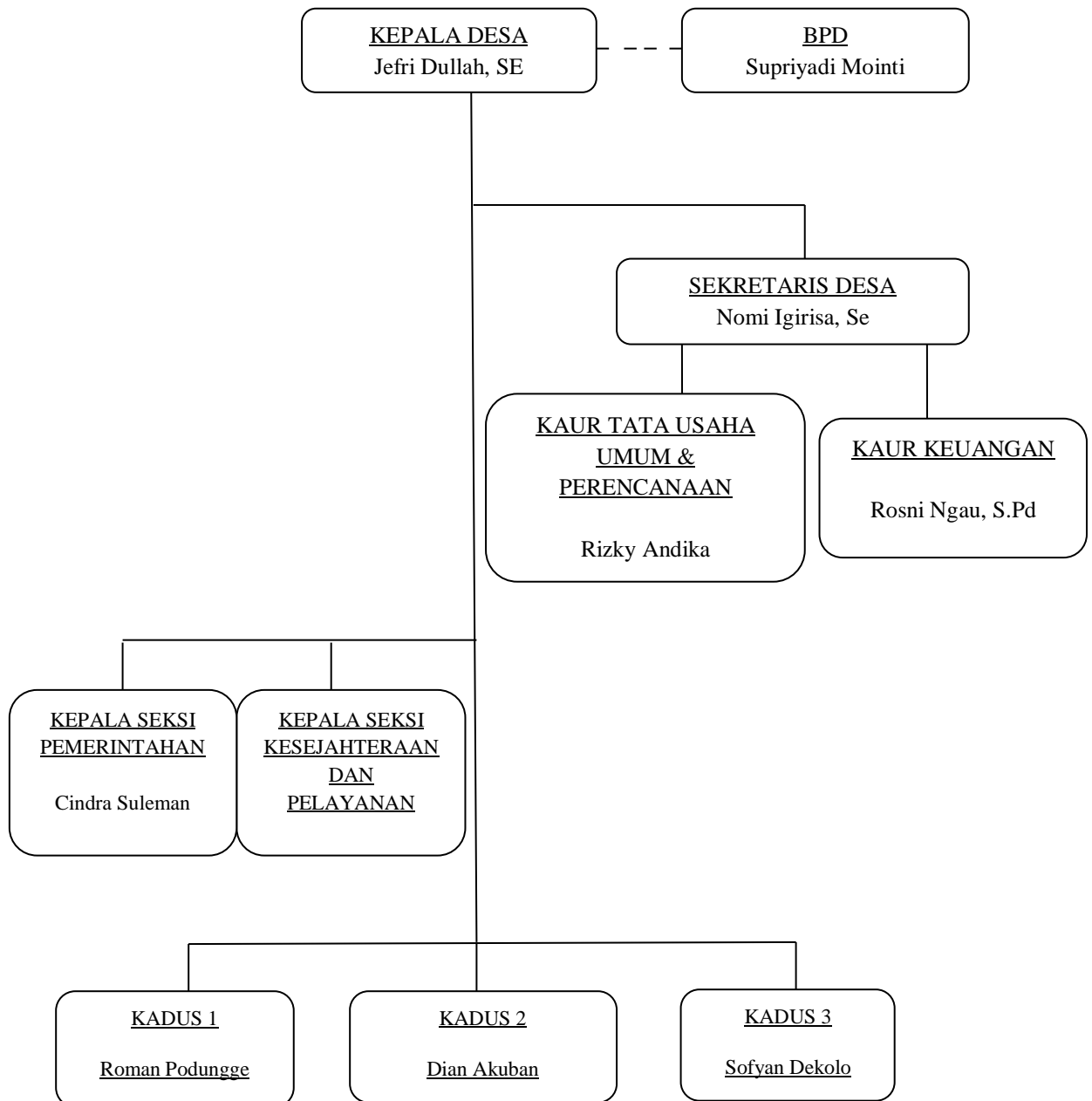
*Tabel 7: Struktur Organisasi Pemerintah Desa*

NO	NAMA	JABATAN	USIA	MASA JABATAN
1	Jefri dullah , SE	Kepala Desa	58 Thn	2019-2020
2	Nomi Igrisa, SE	Sekretaris Desa	45 Thn	2017-2020
3	Aditya Riski Andika	Kaur Tata Usaha dan Perencanaan	30 Thn	2020
4	Rosni Ngau, S.pd	Kaur Keuangan	32 Thn	2019-2020

5	Cindra Suleman	Kepala Seksi Pemerintahan	30 Thn	2017-2020
6	Meyske Usman	Kepala Seksi Kesejahteraan & pelayanan	28 Thn	2017-2020
7	Roman Podungge	Kepala Dusun 1	28 Thn	2017-2020
8	Dian Akuba	Kepala Dusun 2	25 Thn	2017-2020
9	Sofyan Dakelo	Kepala Dusun 3	29 Thn	2017-2020

*Sumber : Dokumentasi Desa tahun 2020*

*Gambar 1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bunuo*



*Sumber : Dokumen Desa Bunuo tahun 2020*

#### 4.1.4 Tugas pokok dan fungsi pemerintah desa

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 di sebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

- **Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  1. pembinaan kemasyarakatan, misalnya dalam hal ini seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  2. penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

3. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

• **Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi :**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  1. Mengurus keuangan termasuk pada administrasi keuangan dan administrasi sumber-sumber pendapatan maupun pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  2. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

3. Melaksanakan urusan umum seperti menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  4. Mengurus perencanaan tata pelaksanaan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau (APB Desa), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- **Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi :**
    - (1) Kepala urusan (KAUR) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
    - (2) Kepala urusan (KAUR) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
    - (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan (KAUR) mempunyai fungsi yaitu:
      1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
      2. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

• **Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi :**

- (1) Kepala seksi (KESI) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi (KESI) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi (KESI) mempunyai fungsi yaitu :
  1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

3. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- **Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi :**

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  1. Mengawasi secara langsung pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  2. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  3. Melakukan upaya-upaya yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemaparan diatas merupakan Tugas dan Fungsi dari pada Kepala desa dan Perangkat desa sesuai isi dari Permendagri Nomor 84 Tahun 2015



tentang SOTK yang di sesuaikan dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **4.1.5 karakteristik responden**

##### **A. Data responden berdasarkan jenis kelamin**

Pada tabel dibawah ini menunjukan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan dokumentasi dan penelitian langsung di lapangan.

*Tabel 7: Jenis kelamin responden*

No	Jenis kelamin	frekuensi
1	Laki-laki	5 orang
2	Perempuan	3 orang
	Total	8 orang

*Sumber : Olah data wawancara dan Dokumentasi Tahun 2020*

##### **B. Data tentang tingkat pendidikan responden**

Pada tabel dibawah ini menunjukan bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sekolah dasar (SD) sebanyak 6 orang, dengan tingkat pendidikan terakhir SLTP sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan terakhir SLTA ada 2 orang, tingkat pendidikan DIPLOMA sebanyak 6 orang, dan tingkat pendidikan S1 (Sarjana) sebanyak 2 orang .

*Tabel 9 : Tingkat pendidikan responden*

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi
1	SD	1 orang
2	SLTP	1 orang
3	SLTA	3 orang
4	DIPLOMA	2 orang
5	SI (sarjana)	1 orang
<b>Total</b>		8 orang

*Sumber : Olah data wawancara dan Dokumentasi Tahun 2020*

#### C. Data tentang tingkat pekerjaan responden

Data dibawah ini menunjukan tingkat pekerjaan responden mulai dari pegawai yaitu sebanyak 8 orang, sedangkan karyawan swasta sebanyak 1 orang, responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani sebanyak 7 orang, dan terakhir yaitu responden yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang yaitu sebanyak 2 orang. Maka dapat diberikan kesimpulan bahwa responden yang memiliki pekerjaan Petani lebih banyak dari responden dari pekerjaan yang lain .

*Tabel 10 :pekerjaan responden*

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentasi
1	Pegawai	3	%
2	Karyawan swasta	1	%
3	Petani	2	%

4	Pedagang	2	%
<b>Total</b>		8	100%

*Sumber : Olah data wawancara dan Dokumentasi Tahun 2020*

#### **4.2 Hasil penelitian dan wawancara**

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. aktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi

masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah

partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait

dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Bunuo terkait dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di desa Bunuo kecamatan bulango utara telah dirangkum pada hasil penelitian setelah mengikuti KKLP di Desa Bunuo serta mengikuti secara langsung proses Musrenbang di Desa Bunuo Kecamatan Bulango utara tersebut.

#### 1. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dalam proses kegiatan Musrenbang Desa Bunuo tahun 2019

Upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus memikirkan dan memanfaatkan kebutuhan mereka dengan segala prioritas yang ditentukan oleh mereka sendiri, dalam artian memecahkan masalah-masalah pembangunan, memberikan pendapat, dan membentuk organisasi sehingga rencana yang sudah direncanakan bisa memberikann manfaat kepada masyarakat itu sendiri .

Dalam tahap perencanaan yaitu tahap penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan dalam hal meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Salah satu bentuk tahapan perencanaan pembangunan yaitu adanya Musrenbang yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Pada kegiatan Musrenbang di Desa Bunuo dengan memperhatikan melalui wawancara dan pengumpulan dokumen berikut penulis melihat berita acaranya, musrenbang desa Bunuo dilaksanakan pada hari kamis, Tanggal 7 februari tahun 2019 pukul 10.00 WIB – pukul 13.15 WIB bertempat di Balai Desa. Acara ini dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, BPD, tokoh pemuda dan masyarakat yang turut diundang berdasarkan pembagian undangan oleh setiap kepala dusun, masing-masing kepala dusun mendapatkan kesempatan membagikan 10 undangan kepada anggota masyarakatnya.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Meyse Usman selaku Kepala seksi kesejahteraan dan palayanan pada wawancara yang dilakukan di kantor Desa Bunuo, Beliau mengatakan :

*“Pada masing-masing Dusun kami membagi kan 10 undangan untuk masyarakat setiap dusunnya, jadi karena di Desa Bunuo memiliki 3 Dusun maka undangan yang disebar berjumlah 30 undangan . pembagian undangan dilakukan 2 hari sebelum kegiatan Musrenbang Desa”.*

Proses Kegiatan Musenbang dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan diantaranya : pertama, pembukaan yang berisikan penyampaian agenda musrenbang desa oleh pemandu yaitu bapak sofyan delatu , ke-dua sambutan dari bapak Supriyadi Moiinti selaku ketua BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ). Dalam sambutannya beliau menyampaikan program pembangunan yang akan di rencanakan di Desa Bunuo yang

meliputi dua bidang yaitu : 1). Pembangunan fisik seperti pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa, 2). Pembangunan non fisik yaitu misalnya seperti pengajian rutin ibu-ibu dan bapak-bapak Desa Bunuo. Ke-tiga bapak Jefri Dullah, SE selaku bapak kepala Desa Bunuo menyampaikan informasi bahwa musrenbang Desa diselenggarakan terkait cairnya ADD (Anggaran Dana Desa) yang berjumlah Rp. 20.813.300,- (*dua puluh empat juta delapan raatus tiga belas tiga ratus rupiah*). Ke-empat pemaparan draft rancangan awal RKPD oleh sekdes , Ke-lima, pamandu membarikan kesempatan kepada peserta musrenbang untuk dapat memberikan tanggapan atau sumbangan pemikiran terkait yang disampaikan oleh aparat desa untuk program pembangunan desa itu sendiri. Ke-enam, penutup yaitu penanda tanganan berita acara musrenbang dan penyampaian kalimat penutup. Akhirnya musrenbang ditutup pada pukul 13.15 WIB.

Musrenbang Desa adalah merupakan kegiatan antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam pelaksanaanya, musrenbang Desa Bunuo di hadiri oleh aparat desa dan masyarakat yang diambil dari perwakilan dari setiap Kepala dusun. Dari 3 dusun yang ada di Desa Bunuo masing –masing Kadus diberikan 10 undangan untuk diberikan kepada aparat desa, maupun masyarakat secara umum . jadi total masyarkat yang diundang ada 30 orang, ditambah dengan aparat desa berjumlah 11 orang. anggota masyarakat dan



aparat desa yang di undang dalam Musrenbang Desa Bunuo pada tahun 2019 untuk menjadi peserta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 11 : Masyarakat yang diundang dalam musrenbang Desa Bunuo tahun 2019*

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan/Kedudukan</b>
1.	Jefri Dullah, SE	Laki-laki	Kepala Desa
2.	Nomi Igrisa, SE	Perempuan	Sekdes
3.	Aditya Riski	Laki-laki	Kaur Tata Usaha & Perencanaan
4.	Rosni Ngau, S.Pd	Perempuan	Kaur Keuangan
5.	Cindra Suleman	Perempuan	Kesie Pemerintahan
6.	Meyske Usman	Perempuan	Kesie Kesejahteraan & Pelayanan
7.	Roman Podungge	Laki-laki	Kadus 1
8.	Dian Akuban	Perempuan	Kadus 2
9.	Sofyan Dekolo	Laki-laki	Kadus 3
10.	Supriyadi Mointi	Laki-laki	Ketua BPD
11.	Abubakar Yunus	Laki-laki	Anggota masyarakat
12.	Fahri Husain	Laki-laki	Pemuda
13.	Reflin Harun	Laki-laki	Pemuda
14.	Afandi Lakoro	Laki-laki	Anggota masyarakat
15.	Reni Uno	Perempuan	Anggota masyarakat

16.	Rohana Syahrain	Perempuan	Anggota masyarakat
17.	Ansar Tuloli	Laki-laki	Anggota masyarakat
18.	Mastin Luma	Laki-laki	Anggota masyarakat
19.	Detter Biya	Laki-laki	Anggota masyarakat
20.	Laila Adam	Perempuan	Pemuda
21.	Lela Domili	Perempuan	Anggota masyarakat
22.	Fitri Ali	Perempuan	Pemuda
23.	Rita Djafar	Perempuan	Anggota masyarakat
24.	Syarifudin Doe	Perempuan	Anggota masyarakat
25.	Taufik Mosii	Laki-laki	Anggota masyarakat
26.	Hendrik Saidi	Laki-laki	Pemuda
27.	Saleh Tuloli	Laki-laki	Anggota masyarakat
28.	Yusuf Djafar	Laki-laki	Anggota masyarakat
29.	Ani Gionte	Perempuan	Pemuda
30.	Agus Mosii	Laki-laki	Anggota masyarakat
31.	Tune Ismail	Laki-laki	Anggota masyarakat
32.	Irwan Saleh	Laki-laki	Pemuda
33.	Mohammad Monoarfa	Laki-laki	Anggota masyarakat
34.	Ram Umahani	Laki-laki	Anggota masyarakat
35.	Yusuf Potale	Perempuan	Pemuda
36.	Hajara Dai	Perempuan	Anggota masyarakat
37.	Hamid Puloo	Laki-laki	Anggota masyarakat

38.	Rosmawati Arsad	Perempuan	Anggota masyarakat
39.	Husni Pade	Laki-laki	Anggota masyarakat
40.	Munifa bumulo	Perempuan	Anggota masyarakat
41.	Rahmat Kaluku	Laki-laki	Pemuda

*Sumber : Data dokumentasi berita acara Musrenbang desa Bunuo 2019 serta wawancara dengan bapak Jefri Dullah, SE (kades) dan ibu Nomi Igrisa, SE (sekdes).*

Pada pelaksanaannya, peserta Musrenbang yang hadir secara keseluruhan hanya 21 orang , sudah termasuk aparat desa tokoh pemuda dan anggota masyarakat umum. sedangkan seluruh undangan yang disebar berjumlah 41 undangan. Tetapi pada kenyataannya anggota masyarakat yang hadir yang seharusnya berperan penting dalam pelaksanaan musrebang hanya 12 orang saja yang hadir sisanya adalah aparat desa. Sedangkan pihak aparat desa sudah mengupayakan semua komponen agar hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut, terutama masyarakat desa itu sendiri. Agar lebih jelasnya terkait siapa saja yang hadir , dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 12 : Daftar Masyarakat yang diundang dan menghadiri Musrenbang Desa*

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Kedudukan
1.	Jefri Dullah, SE	Laki-laki	Kepala Desa
2.	Nomi Igrisa, SE	Perempuan	Sekdes

3.	Aditya Riski	Laki-laki	Kaur Tata Usaha & Perencanaan
4.	Rosni Ngau, S.Pd	Perempuan	Kaur Keuangan
5.	Cindra Suleman	Perempuan	Kesie Pemerintahan
6.	Roman Podungge	Laki-laki	Kadus 1
7.	Dian Akuban	Perempuan	Kadus 2
8.	Sofyan Dekolo	Laki-laki	Kadus 3
9.	Supriyadi Mointi	Laki-laki	Ketua BPD
10.	Ansar Tuloli	Laki-laki	Anggota masyarakat
11.	Mastin Luma	Laki-laki	Anggota masyarakat
12.	Reflin Harun	Laki-laki	Pemuda
13.	Syarifudin Doe	Perempuan	Anggota masyarakat
14.	Taufik Mosii	Laki-laki	Anggota masyarakat
15.	Hendrik Saidi	Laki-laki	Pemuda
16.	Saleh Tuloli	Laki-laki	Anggota masyarakat
17.	Hajara Dai	Perempuan	Anggota masyarakat
18.	Hamid Puloo	Laki-laki	Anggota masyarakat
19.	Rosmawati Arsad	Perempuan	Anggota masyarakat
20.	Munifa bumulo	Perempuan	Anggota masyarakat
21.	Rahmat Kaluku	Laki-laki	Pemuda

*Sumber : Dokumentasi Daftar hadir peserta Musrenbang Desa Bunuo tahun*

*2019*

Pada dokumentasi daftar hadir diatas dapat dilihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri kegiatan Musrenbang. Warga masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan Musrenbang .

seperti yang dikatakan oleh ibu Cindra Suleman selaku kepala seksi pemerintahan, Beliau mengatakan :

*“ Dalam kegiatan Musrenbang Desa memang Masyarakat harus berpartisipasi aktif, karena ini adalah salah satu ujung tombak untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri, kalau mereka tidak hadir bagaimana kami akan tau apa yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Bunuo agar Bermanfaat untuk masyarakat tersebut”.*

Sedangkan 18 orang yang tidak sempat hadir dalam Musrenbang yaitu diantaranya siapa saja yang tidak hadir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 13: daftar masyarakat yang diundang tetapi tidak hadir dalam kegiatan musrenbang*

No	Nama	Jenis kelamin	Jabatan/kedudukan
1.	Abubakar Yunus	Laki-laki	Anggota masyarakat
2.	Fahri Husain	Laki-laki	Pemuda
3.	Afandi Lakoro	Laki-laki	Anggota masyarakat
4.	Reni Uno	Perempuan	Anggota masyarakat

5.	Rohana Syahrain	Perempuan	Anggota masyarakat
6.	Detter Biya	Laki-laki	Anggota masyarakat
7.	Laila Adam	Perempuan	Pemuda
8.	Lela Domili	Perempuan	Anggota masyarakat
9.	Fitri Ali	Perempuan	Pemuda
10.	Rita Djafar	Perempuan	Anggota masyarakat
11.	Yusuf Djafar	Laki-laki	Anggota masyarakat
12.	Ani Gionte	Perempuan	Pemuda
13.	Agus Mosii	Laki-laki	Anggota masyarakat
14.	Tune Ismail	Laki-laki	Anggota masyarakat
15.	Irwan Saleh	Laki-laki	Pemuda
16.	Mohammad Monoarfa	Laki-laki	Anggota masyarakat
17.	Ram Umahani	Laki-laki	Anggota masyarakat
18.	Yusuf Potale	Laki-laki	Pemuda

*sumber : hasil wawancara tahun 2020*

Diantara mereka yang tidak hadir dalam Musrenbang, ada yang beralasan bahwa bapak Detter biya mengatakan:

*“ saya tidak mau hadir karna saya masih ada pekerjaan yang lebih penting dari pada hadir di rapat musrenbang, dengan pekerjaan saya sebagai buruh saya tidak punya waktu untuk hadir”.*

Sedangkan ibu rita djafar mengatakan :

*“ saya tidak bisa hadir karena saya punya warung dan pekerjaan rumah lainnya tidak bisa ditinggalkan, biar orang lain saja yang hadir “*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan memang benar adanya masyarakat ikut berpartisipasi dalam musrenbang desa, namun masyarakat yang hadir hanya sedikit, Ini menjadi pengaruh dalam kegiatan Musrenbang yang dilakukan .

Oleh karena itu dapat disimpulkan melihat dari kehadiran masyarakat lebih banyak tidak hadir daripada masyarakat yang ikut dalam kegiatan musrenbang, partisipasi masyarakat dalam kehadiran masih dikatakan kurang memuaskan .

## 2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berhubungan erat dengan perencanaan dan pelaksanaannya, apakah sudah dipertimbangkan dalam memutuskan prioritas pembangunan atau tujuannya bisa direalisasikan atau dimanfaatkan dengan baik atau tidak, semuanya tergantung pada tahap perencanaan. Oleh sebab itu rencana harus diupayakan semaksimal mungkin. Dan partisipasi masyarakat dalam bentuk keaktifan dapat dilihat dalam tahap pelaksanaan pembangunan tersebut. Misalnya dalam pembangunan infrasturuktur desa misalnya MCK atau bantuan dari dana desa yang dilakukan di Desa Bunuo , kecamatan Bulango Utara. Keikutsertaan masyarakat bukan hanya dilihat dari sumbangan tenaganya

saja, tetapi juga bentuk kerja sama dalam kegiatan pembangunan MCK tersebut.

Pada kegiatan pembangunan MCK yang dilakukan di desa Bunuo , terdapat beberapa warga yang ikut berkontribusi menyumbangkan keahlian mereka misalnya sebagai tukang, dan juga ada warga yang memberikan kontribusi harta berupa makanan dan minuman seperti kopi dan gorengan .

Seperti hasil wawancara yang dilakukan pada bapak Agus mosii memberikan pernyataannya bahwa :

*“pada pembangunan MCK di desa, saya hanya bisa menyumbangkan tenaga untuk sama-sama dengan warga lainnya saling gotong royong dalam membangun MCK tersebut, juga memberikan sumbangan berupa material seperti sekop , karena sesuai keahlian saya yaitu sebagai buruh.”*

Dapat kita nilai bersama partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, material, dan keahlian adalah salah satu bentuk dukungan sosial masyarakat dalam menerima hasil pembangunan . dan bertanggung jawab atas pembangunan yang ada di daerah tersebut.

### 3. partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi

Dalam tahapan evaluasi masyarakat harus mengambil bagian yang lebih dalam pembangunan yang ada di Desa tersebut. Karena tahap evaluasi ini gunanya yaitu masyarakat merupakan umpan balik yang dapat memberikan



masuk demi perbaikan pelaksanaan proyek pembangunan selanjutnya. Dalam pengevaluasian pembangunan dilakukan oleh aparat Desa, dalam hal ini kepala desa dan aparat desa lainnya, tujuannya yaitu melihat dan memantau apakah hasil pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan aparat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang sebelumnya dan juga apakah hasil pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan atau tidak. Misalnya pada pembangunan infrastruktur desa berupa MCK setelah dilakukan wawancara langsung kepada bapak kepala Desa Bunuo kecamatan Bulango utara pada hari selasa tanggal 10 februari 2020. Pada wawancara tersebut bapak Jefry Dullah (kades) beliau mengatakan :

*“pada pelaksanaan pembangunan MCK di desa, masyarakat ikut memantau pelaksanaan pembangunan tersebut walaupun mereka hanya melihat dari depan rumah mereka saja, sambil minum kopi dan santai-santai”*

Selain dari pada itu seperti yang diungkapkan oleh bapak agus mosii (anggota masyarakat) Desa Bunuo , mengatakan :

*“iya kami juga ikut melakukan pemantauan dalam pembangunan MCK di desa, alasannya karena kami juga ingin melihat apakah pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan bersama aparat desa”*

Ada pula masyarakat yang dalam tahap evaluasi ini ikut serta menyumbangkan tenaga dalam pembangunan MCK tersebut, artinya masyarakat ikut peduli dalam pembangunan tersebut, mengingat semua itu

juga demi kepentingan masyarakat itu sendiri . seperti yang di sampaikan bapak Afandi lakoro mengatakan :

*“saya sebagai masyarakat yang ikut senang dalam melihat pembangunan di desa, ikut menyumbangkan tenaga dalam pembangunan MCK tersebut . karena ini semua juga kan akan dimanfaatkan masyarakat juga”*

Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap evaluasi pembangunan yang dilakukan di Desa Bunuo, masyarakat cukup berpartisipasi dalam hal melihat dan memantau jalannya pembangunan tersebut.

#### 4. Faktor penghambat partisipasi masyarakat

##### a. Sikap masa bodoh, malas, atau apatis

Dalam kehidupan sehari-hari kita kerap kali dirugikan maupun direpotkan dengan tindakan sebagian masyarakat yang tidak peduli atau tidak peka dengan lingkungan sekitar. Hal ini menjadikan sebagian masyarakat tersebut menjadi apatis, malas , atau masa bodoh baik pada sesama manusia maupun dengan lingkungan sekitarnya . sikap tidak saling menghargai dan intropeksi diri atau tidak sadar diri nampak sekali dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat yang masa bodoh atau bisa disebut juga dengan malas, adalah salah satu faktor yang menghambat dalam partisipasi masyarakat. Tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakatnya. Seperti

yang terjadi pada masyarakat Desa Bunuo, Sifat malas pada masyarakat ini karena beberapa penyebab, yaitu diantaranya karena capek seharian bekerja, atau masa bodoh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh aparat desa, maka penyebabnya yaitu kurangnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrenbang Desa. Hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian melalui wawancara dengan masyarakat desa Bunuo, seperti yang dikatakan oleh ibu Reni Uno :

*“ saya tidak hadir dalam Musrenbang Desa karena saya masih banyak pekerjaan yang lebih bermanfaat, kebetulan juga saya punya warung jadi saya tidak punya waktu untuk hadir dalam rapat Musrenbang tersebut”*

Ada juga Fahri Husain selaku pemuda yang ada di desa bunuo tersebut mengatakan :

*“ saya tidak hadir dalam Musrenbang karena malas saya hadir di acara yang begitu, saya pun tidak mengerti tentang pembahasan-pembahasan mengenai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat desa “*

Ini membuktikan bahwa masyarakat masih dikatakan apatis dalam menanggapi perlunya atau pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

#### b. Tipologi wilayah

Tipologi yang dimaksud disini adalah terdiri atas : 1) pengaruh letak atau keadaan geografis pada suatu wilayah, 2) luas dan bentuk wilayah 3) batas-

batas wilayah, dan 4) pengaruh biotik. Pada topologi wilayah di Desa Bunuo relatif tidak datar, desa yang didominasi oleh perbukitan yang sebagian wilayahnya berada di pegunungan dan dengan kondisi jalan yang bisa dibilang tidak kondusif.

Dengan kondisi alam yang demikian jarak yang ditempuh masyarakat biasanya 2km seperti pada hasil wawancara dengan masyarakat bunuo ibu rosmawaty arsyad :

*“Biasanya saya pergi ke kantor desa dalam menghadiri rapat musenbang ditempuh dengan berjalan kaki, karena kalau naik kendaraan bermotor saya takut, keadaan jalan yang berbatu dan jika hujan pasti becek, jadi biasanya saya berjalan kaki bisa memakan waktu 15 sampai 20 menit dari rumah , kadang saya malas menghadiri rapat dan ikut berpartisipasi karena alasan ini. “*

Dengan pernyataan ibu rosmawaty diatas, tipologi wilayah berpengaruh dalam partisipasi masyarakat.

#### c. Letak geografis

Letak geografi biasanya dilihat dari letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Letak geografis biasanya dibatasi dengan fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang bersebelahan dengan daerah tersebut. Seperti benua, gunung, gurun, samudra, dan lain sebagainya . Letak geografis Desa Bunuo kecamatan bulango utara dengan batas-batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa longalo
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Atinggola
- c. Sebelah timur berbatasan dengan tuloa
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tupa

Dengan letak geografis seperti pada Desa Bunuo biasanya warga bisa menempuh jarak sampai 2 km dengan waktu yang bisa ditempuh . dapat dilihat pada gambar berikut adalah keadaan wilayah Desa Bunuo yang letaknya di perbukitan . tentunya mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam menghadiri rapat musrenbang. Seperti pada wawancara yang dilakukan kepada ibu Reni uno selaku masyarakat Desa Bunuo mengatakan :

*“ saya tidak sempat hadir karna tidak punya kendaraan untuk digunakan menuju kantor desa , sebab jalannya juga bisa dikatakan berbukit, jadi kalau berjalan kaki bisa memakan waktu lama”*

- c. Jumlah penduduk

Komposisi penduduk atau jumlah penduduk adalah pengelompokan atau susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya dengan mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin penduduk, usia penduduk, angkatan kerja, dan juga rasio ketergantungan.

Dalam tatanan jumlah penduduk Desa Bunuo yaitu seperti pada tabel 1 mengenai keadaan dan jumlah penduduk yang pada tahun ini saja hanya berjumlah 416 jiwa. Sedangkan yang aktif dalam kegiatan musrenbang

dalam hal ini kehadiran hanya ada 12 orang saja. Maka dapat disimpulkan jumlah penduduk dapat menghambat partisipasi masyarakat.

*Tabel 1: Keadaan dan Jumlah Penduduk*

<b>Jumlah</b>	<b>Laki-laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
Jumlah penduduk tahun ini (2020)	210	206
Jumlah penduduk tahun lalu (2019)	210	204
Persentase perkembangan	0.00%	%

*Sumber : Dokumentasi Desa Bunuo tahun 2020*

d. Keadaan ekonomi desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa ekonomi desa memiliki arti yaitu adalah kegiatan konsumsi, produksi dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Jika dikaitkan dengan keadaan ekonomi masyarakat desa bunuo yang sebagian besar bentuk penanaman modalnya yaitu digunakan pada sektor pertanian , peternakan, dan perkebunan , seperti pada tabel berikut :

*Data jumlah penduduk berdasarkan Mata pencaharian*

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pertanian	71 orang

2	Perkebunan	71 orang
3	Peternakan	120 orang
4	Buruh	23 orang
5	Karyawan swasta	20 orang
6	PNS	4 orang
7	Lain-lain	107 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>416 orang</b>

*Sumber : Dokumentasi Desa Bunuo tahun 2020*

Kaitannya dengan Salah satu faktor yang menghambat partisipasi masyarakat yaitu masyarakat lebih mementingkan kepentingan ekonomi mereka daripada harus berpartisipasi dalam pembangunan di Desa . dalam wawancara bersama bapak yusuf djafar ,beliau mengatakan :

*“ saya kebetulan memiliki tempat ternak ayam, jadi sehari-hari saya sibuk mengurus pekerjaan saya, hanya dengan pekerjaan itu saya bisa menghidupi keluarga saya”*

Pernyataan dari bapak yusuf di atas dapat disimpulkan bahwa, keadaan ekonomi masyarakat desa tergantung pada pekerjaan mereka yang kesehariannya yaitu sebagai peternak, dan petani.

### **4.3 Pembahasan**

1. Dari hasil wawancara di atas pada tahap perencanaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang desa dengan melibatkan masyarakat langsung dengan

melihat kehadiran anggota masyarakat itu sendiri masih belum maksimal . pentingnya kesadaran masyarakat dan keaktifan pemimpin dalam hal ini kepala desa sangat mempengaruhi kegiatan musrenbang tersebut.

2. Jika melihat hasil wawancara di atas pada tahap pelaksanaan musrenbang desa yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Dilihat dari partisipasi masyarakat yang ikut menyumbangkan tenaga, keahlian dan uang sangat membantu terlaksananya kegiatan pembangunan di desa bunuo kecamatan bulango utara kabupaten bone bolango.
3. Dari hasil wawancara di atas pada tahap evaluasi partisipasi masyarakat sudah bisa dikatakan memberikan partisipasi , walaupun mereka hanya memantau pemanfaatan hasil pembangunan dari kejauhan .
4. Dari hasil wawancara dan pemantauan secara langsung menyangkut Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat diantaranya sikap masa bodoh, dilihat dari tipologi wilayah, letak geografis, jumlah penduduk dan keadaan ekonomi desa. Yang masih sangat berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam musrenbang yaitu masyarakat yang masih memiliki sifat apatis atau malas dan jumlah penduduk desa bunuo yang masih dapat dikatakan kurang.

Dalam kegiatan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab



masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat, masyarakat sebagai kunci penentuan keberhasilan desa. Artinya, melalui partisipasi yang di berikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa semata tetapi menuntut keterlibatan masyarakat secara total agar dapat tercapai dan menyentuh falsafah bangsa Indonesia yaitu sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara empiris sesuai dengan apa yang

penulis temukan di lokasi penelitian, dimana sebagian besar masyarakatnya berpartisipasi secara sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak lain. Keikutsertaan masyarakat yang datang secara sukarela untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pembangunan mensyaratkan adanya kepercayaan, peluang dan kesempatan yang di berikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan sangat besar. Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan aparat desa dalam hal ini pemerintah desa bahwa masyarakat bukan sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan semata, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat di andalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat Desa Bunuo tergolong rendah, yaitu *pertama*, pada tahap perencanaan dapat dilihat dari kehadiran pada saat Musrenbang Desa. kesibukan masyarakat desa yang bekerja sehingga tidak hadir secara langsung dalam Musrenbang Desa. karena banyaknya usulan dari masyarakat namun pelaksanaan dari pemerintah desa sangat kurang, ini juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. masyarakat menjadi jenuh dan malas karena banyak usulan yang diajukan namun pelaksanaan dari desa kurang diperhatikan atau direalisasikan. *Kedua*, pada tahap pelaksanaan pembangunan desa dinilai cukup baik, masyarakat dengan penuh tanggung jawab saling bergotong royong menyumbangkan sesuai keahlian yang mereka punya, *ketiga*, pada tahap evaluasi, masyarakat ikut melihat dan memantau secara langsung pembangunan yang ada di Desa Bunuo kecamatan Bulango Utara.
2. Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu dari beberapa faktor diantaranya sikap malas, tipologi wilayah, letak geografis, jumlah penduduk, dan keadaan ekonomi yang sangat berpengaruh adalah sifat malas, karena yang memicu sifat apatis masyarakat yaitu dengan keadaan tipologi wilayahnya, letak

geografisnya dan jumlah penduduk yang tergolong masih sangat rendah.

## **B . Saran**

1. Kepala desa harus memberikan sosialisasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Bunuo kecamatan Bulango utara. pemerintah atau aparat desa seharusnya lebih mengerti apa yang menjadi prioritas pembangunan atau yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan masyarakatnya, agar masyarakat kedepannya bisa lebih aktif dalam kehadiran atau berpartisipasi langsung dalam pembangunan Desa Bunuo. Kemudian pemerintah pun harus mengerti dan lebih memahami pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dan benar atau bermanfaat bagi masyarakatnya atau tidak.
2. Dalam proses Musrenbang Desa, aparat desa bisa memberikan reward kepada masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut agar menjadi motivasi kepada masyarakat yang lainnya untuk tidak bermalas malasan dalam hal menyampaikan aspirasi mereka. Aparat desa bisa lebih memotivasi masyarakat banyak agar terlibat dalam pembangunan . memperbaiki jalan menuju Kantor desa adalah salah satu faktor yang mendukung masyarakat agar lebih mudah mengikuti rapat Musrenbang di Desa Bunuo kecamatan Bulango Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasiru, R., & Jasin, M. (2009). *pembangunan berdasarkan dinamika masyarakat*. Yogyakarta: HPMIG Press.
- Husain, W. (2011). *participative leadership*. Bandung: MQS publishing.
- kuncoro, m. (2010). *ekonomika pembangunan*. JI. Kaliurang km14: Erlangga.
- Makmur. (2009). *teori manajemen stratejik dalam pemerintahan dan pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Muljana, B. (2011). *perencanaan pembangunan nasional*. Yogyakarta: Universitas Indonesia.
- Pembangunan, P. (1980). *Bintoro Tjokroamidjojo*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Prastowo, A. (2012). *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: AR-RUZZ media.
- Prof. Mudjarad Kuncoro, P. (2010). *masalah, kebijakan, dan politik*. JI. Kaliurang KM14: Erlangga.
- Sastropoetro, S. (1986). *partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: ALUMNI.
- Sjafrizal. (2014). *perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudriamunawar, H. (2012). *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sunarti. (2003). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara kelompok*. Semarang: Planologi.
- Tjokroamidjojo, B. (1980). *perencanaan pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Widjaja, H. (2010). *otonomi desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia.

## Dokumentasi

Gambar 1 : Kantor Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara



Gambar 2 : wawancara dengan Kepala Desa Bunuo



gambar 3 : wawancara dengan kepala seksi pemerintahan



Gambar 4 : wawancara dengan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan



Gambar 5 : wawancara dengan masyarakat Desa Bunuo



Gambar 6 : wawancara dengan masyarakat Desa Bunuo





Gambar 7 : keadaan Jalan menuju Kantor Desa Bunuo



Gambar 8 : perkebunan jagung milik masyarakat Desa Bunuo





15/6/2020

lemlit.ichsan/lemlit/cetak-surat-penelitian-mahasiswa/1963/



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@uisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@uisan.ac.id)

Nomor : 2073/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Bunuo

di,-

Kab. Bone Bolango

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Febrianti Mantali  
NIM : S2116041  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : DESA BUNUO KECAMATAN BULANGO UTARA  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
Judul Penelitian : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUNUO  
KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE  
BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Februari 2020



Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**KECAMATAN BULANGO UTARA**  
**DESA BUNUO**

*Jln. Lingkar Desa Bunuo No. 1 Kode Post 96582*

Nomor : 30 /DB/KBU/II/2020  
 Lamp :  
 Perihal : Penerimaan Mahasiswa Penelitian

Kepada Yth,  
 Ketua Lembaga Penelitian ( LEMLIT )  
 Universitas Ichsan Gorontalo  
 Di  
 Gorontalo

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian ( LEMLIT ) Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 2073/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020, Tanggal 04 Februari Tahun 2020 tentang Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan Izin Pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : **FEBRIANTI MANTALI**  
 NIM : S2116041  
 Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Lokasi Penelitian : Desa Bunuo Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango  
 Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BUNUO  
 KECAMATAN BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO**

Demikian surat Penerimaan Izin Penelitian ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Bunuo, 11 Februari 2020  
 Kepala Desa  
  
**DAHLAN SULEMAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0238/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FEBRIANTI MANTALI  
NIM : S2116041  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Desa Bunuo  
Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Juni 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

## Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa bunuo kec. Bolango utara

### ORIGINALITY REPORT

<b>29%</b>	<b>23%</b>	<b>8%</b>	<b>25%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Makassar</b> Student Paper	<b>7%</b>
<b>2</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>3</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>gampongkalut.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.slideshare.net</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>jdih.banyuwangikab.go.id</b>	

	Internet Source	1%
10	<a href="http://bulelengkab.go.id">bulelengkab.go.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://jurnal.umrah.ac.id">jurnal.umrah.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://ejurnal.untag-smd.ac.id">ejurnal.untag-smd.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
16	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1%
17	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
18	<a href="http://munar-mng.blogspot.com">munar-mng.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
20	<a href="http://www.mah-eisa.ac.id">www.mah-eisa.ac.id</a> Internet Source	<1%

21	<a href="http://prismamika.blogspot.com">prismamika.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://rimbaceloteh.blogspot.com">rimbaceloteh.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
26	<a href="http://stepanusmawar.blogspot.com">stepanusmawar.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://ciburial.desa.id">ciburial.desa.id</a> Internet Source	<1%
28	<a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	<1%
29	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%
30	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
31	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%
32	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a>	

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Febrianti Mantali  
**NIM** : S2116041  
**Fakultas** : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
**Program Studi** : Ilmu Pemerintahan  
**Tempat Tanggal Lahir** : gorontalo, 10-februari-1994



### **Nama Orang Tua**

- Ayah : Suwitno Mantali  
 - Ibu : Hidansi Lumoto

### **Saudara**

**Kakak** : -

**Adik** : Firgin Mantali

Agil Riadi Mantali

Fadli Mantali

Fara Fadhila Mantali

**Suami/istri** : Riyanto Ahmad

**Anak** : Arkan Wiratama Ahmad

**Riwayat Pendidikan** :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005	SDN 20 GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijazah
2	2008	SMPN 3 GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2011	SMAN 4 GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2020	FISIP UNISAN GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijazah

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara kepada aparat desa**

- Siapa sajakah yang akan diundang dalam pramusrenbang dan musrenbang ?
- Siapa saja orang-orang yang hadir dalam musrenbang?
- Berapa lama jarak waktu antara undangan dengan waktu pelaksanaan tersebut?
- Siapa saja yang menjadi narasumber dalam musrenbang?
- Siapa saja orang-orang yang aktif memberikan usulan/saran dalam musrenbang?

### **B. Wawancara kepada tokoh masyarakat**

- Apakah anda diundang dalam musrenbang ?
- Apakah anda hadir dalam musrenbang? Kalau tidak hadir apa alasannya ?
- Anda berpartisipasi apa dalam musrenbang ?
- Apa saja kendala anda tidak hadir dalam rapat musrenbang ?
- Menurut anda, apa saran anda terkait dengan adanya musrenbang di desa bunuo dalam program pembangunan sehingga dapat berjalan lebih efektif untuk kedepannya ?
- Bagaimana pendapat anda mengenai program-program yang diusulkan dalam musrenbang ?



- Apakah seluruh usulan dari musrenbang bisa diakomodir oleh aparat desa ?
- Apakah program yang anda usulkan saat ini sudah dijalankan? Dan jika belum, apa kendalanya ?
- Apakah bapak/ibu berpartisipasi aktif (memberikan saran, tenaga, uang, tenaga dan uang, barang, keahlian) dalam musrenbang ? (ya atau tidak), apa alasannya?
- Menurut bapak/ibu apakah musrenbang bermanfaat dan perlu dilanjutkan?
- apa manfaat yang bapak/ ibu rasakan dalam musrenbang ?